

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat hukum: Problematik Ketertiban yang
Jakarta, 2004, Adil, PT. Grasindo,
- Mochtar kusuma atmaja: Teori hukum pembangunan, Jakarta: epistema intitute.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,
Jakarta,1993 Bina Aksara
- Lamintang, dkk., Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan,
Jakarta,2009 Sinar Grafika
- Effendi Tolib, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sunarto Siswanto, 2009, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*,
Jakarta:Rineka Cipta.
- Hatta, Moh. 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*,
Liberty Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*,
Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Amrullah, M. Arief, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

“Kebijakan Transnasional dan Internasional serta Implikasi terhadap Pendidikan Hukum Pidana serta Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, makalah yang disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI), Bandung, Tanggal 16-19 Maret 2008.

Emmy L.S., *Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan*, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.

Sagala, R. Valentina, “Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010.

Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang, Indepht Publishing, Bandar Lampung, 2014.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia* (Satu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta.

Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi, dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Editor Taftazani, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO;

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik;

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Prana Luar

www.wikipedia.com

www.hukumonline.com

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://www.kemenpppa.go.id>

